

Jurnalis dan Jurnalisme Peka Konflik di Indonesia

Sunarni

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI

Email : aernee@gmail.com

Abstract

Mass media has the ability to determine the thoughts, perceptions, opinions, and even people's behavior. Whether we realize it or not, journalists or media has a very significant role in the conflict. Media coverage does not always guarantee that the reporting sensitive and responsible. Therefore, journalists need to develop and implement conflict-sensitive journalism by giving attention to the public interest

Conflict sensitive journalism is not a new form of journalism that aims to create special conditions in the community (such as "peace"), but rather an attempt or approach to produce quality reports with the basic values of journalism. Application of conflict sensitive journalism is pushing back against the practice of journalism alignment deviates.

Key words : *journalist, conflict, journalism sencitive conflict*

Abstraksi

Media massa memiliki kemampuan menentukan pemikiran, persepsi, opini, dan bahkan perilaku masyarakat. Disadari atau tidak, jurnalis atau media massa memiliki peran sangat signifikan dalam konflik. Liputan media tidak selalu menjamin pelaporan yang peka dan bertanggung jawab. Karena itu, jurnalis perlu membangun dan menerapkan jurnalisme peka konflik dengan memberikan perhatian kepada kepentingan publik.

Jurnalisme peka konflik bukanlah bentuk jurnalisme baru yang bertujuan menciptakan kondisi khusus dalam masyarakat (seperti "perdamaian"), melainkan suatu usaha atau pendekatan untuk menghasilkan reportase berkualitas dengan dasar nilai-nilai jurnalisme yang berlaku. Penerapan jurnalisme peka konflik ini mendorong pelurusan kembali terhadap praktik jurnalisme menyimpang.

Kata kunci : *jurnalis, konflik, jurnalisme peka konflik*

Pendahuluan

Bagaimana seseorang jurnalis membangun sebuah berita yang layak? Bill Kovach dan Tom Rosenthal dalam buku *The Element Of Journalism, What Newspeople Should Know and The Public Should Expect* (2012) merumuskan sembilan elemen jurnalisme yang meliputi jurnalis sebagai pencari kebenaran, loyalitas utama jurnalisme kepada warga negara, disiplin verifikasi. Tidak hanya itu, jurnalis harus menjaga independensinya, membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan, jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi, serta harus membuat berita

yang komprehensif dan proporsional. Seorang jurnalis juga harus mendengarkan nuraninya.

Pernyataan itu terungkap bahwa bahwa tugas jurnalis yang utama adalah menjalankan profesi secara independen dengan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Jurnalis juga tidak boleh memihak salah satu pihak atau hanya menyuarakan pihak tertentu dan menafikan keberadaan pihak lain. Jurnalis tidak boleh membawa kepentingan salah satu pihak yang bertikai. Ia harus memiliki komitmen ketika bertugas untuk mencari berita dan menginformasikannya kepada pembaca atau publik sesuai standar teknis dan etika jurnalistik. Peralnya, semua pihak memi-

liki hak yang sama atas akses informasi. Tidak hanya itu, landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme juga tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Di Indonesia, kode etik profesi disahkan Dewan Pers bersama organisasi wartawan. Bahkan organisasi wartawan juga mengeluarkan KEJ bagi anggotanya, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, dimana undang-undang ini menjamin kebebasan pers untuk kepentingan publik sehingga dalam pelaksanaan fungsi, hal dan kewajiban serta peranannya, pers harus menghormati hak publik, profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat demi kepentingan publik.

Kenyataannya, media massa memiliki keterbatasan dalam menyajikan seluruh realitas sosial sehingga ada proses seleksi isu atau topik yang akan disajikan kepada publik. Pemilihan apa yang ingin disajikan ini bergantung pada misi, visi, nilai, atau ideologi media massa tersebut. Media menyeleksi isu atau peristiwa, media itu telah berpihak kepada suatu nilai. Dalam kaitan ini, posisi media akan berada dalam tiga kemungkinan keberpihakan, yakni apakah media cenderung berafeksi positif, netral, atau negatif.

Jurnalisme Konflik

Disadari atau tidak, media massa mempunyai kemampuan menentukan pemikiran, persepsi, opini, dan bahkan perilaku masyarakat. Seorang jurnalis harus memerhatikan dinamika dan kepentingan publik dalam merespons isu yang akan disajikan. Jurnalis bertanggung jawab menggali fakta dan mengonstruksikan dalam konteks yang tepat, tanpa memihak kepentingan pribadi atau pemilik modal karena dalam melaporkan fakta, media sebenarnya secara terus-menerus memengaruhi perkembangan suatu peristiwa. Dedy N Hidayat (Syahputra:2006) mengemukakan, telah terjadi perang besar yang melibatkan jurnalis di berbagai sudut dunia. Perang yang dimaksud adalah perang para jurnalis melawan berbagai tendensi dalam dirinya. Himpitan pemilik media dan industri media, serta hegemoni ideologi yang memicu konflik dan bertentangan dengan jurnalisme damai.

Kenyataannya, kekerasan simbolik (*symbolic violence*) dapat muncul melalui teks-teks yang diproduksi jurnalis. Teks berita meskipun sepenuhnya berdasarkan fakta tetap merupakan realitas simbolik yang tidak berbanding lurus dengan realitas “objektif” peristiwa yang diberitakan. Selain kelengkapan, akurasi dan verifikasi serta relevansi, terdapat sentimen primordial, pilihan politik dan berbagai konsepsi ideologis tentang realitas sosial jurnalis yang direpresentasikan pada teks, seperti di banyak teks liputan di media cetak, elektronik maupun daring.

Dalam kamus Webster, konflik dipersepsi sebagai perbedaan kepentingan (*perceive divergence interest*) atau suatu kepercayaan pihak-pihak yang berkonflik, dimana aspirasinya tidak dapat dicapai secara simultan. Kepentingan (*interest*) dimaknai sebagai perasaan individu mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan (Raven dan Rubin dalam Pruitt, 2004:31).

(Hasrulah, 2009:39) mengutip Farrington dan Chertok (1993) dalam memetakan pemikiran Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes yang melihat kecenderungan konflik sebagai sesuatu elemen dasar dari sifat manusia, sementara Charles Darwin dan Robert Maltus membahas konflik dari sudut pandang kompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Herbert Spencer memandang konflik sebagai proses alamiah yang memberikan kontribusi pada perubahan sosial. Sedangkan William Graham Sumner memandang konflik sebagai kompetisi dalam rangka untuk memertahankan hidup dan dalam hal tersebut berpengaruh positif pada kemajuan sosial.

Para pemikir besar dalam ilmu sosial menganalisis konflik sebagai sesuatu yang menyatu (*embedded*) dalam diri manusia. Konflik adalah salah satu cara untuk mempertahankan hidup terhadap lingkungannya. Pandangan kontemporer menyebutkan, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Konflik tidak dijadikan sebagai sesuatu yang destruktif, tapi konstruktif. (Myers, 1993:234).

Konflik sebagai konstruksi sosial yang disajikan di media melibatkan realitas subjektif berbagai pihak, sehingga tidak ada kepastian bahwa pencerminan realitas objektif dimata publik dapat dinilai sebagai kebenaran yang mencerahkan (*enlightening*). Sebaliknya, hal itu juga memicu pertikaian atau konflik dengan pihak lain.

Peristiwa yang mengandung konflik seringkali

dianggap layak untuk dijadikan sebagai sebuah berita. Konflik dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi karena biasanya menimbulkan kerugian atau korban (Ishwara, 2001:77). Hal itu bisa dilihat dalam peperangan, perkelahian atau tawuran, kerusuhan, pembunuhan atau perdebatan yang terkait dengan isu-isu lainnya seperti reaktor nuklir, politik, kemasyarakatan, agama, ekonomi, budaya maupun olahraga.

Pembahasan

Jurnalisme mendukung demokrasi, hak asasi dan perdamaian melalui ketidakberpihakan, kemandirian, tidak advokasi dan kualitas pelaporan tingkat tinggi. Informasi dari jurnalis dapat menjadi alat untuk pemberdayaan masyarakat dalam membangun opininya, terutama untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Media juga menjadi *Voice to the Voiceless*, artinya menerima dan menyuarakan pendapat masyarakat kepada publik. Jurnalisme mempunyai peran penting dalam masyarakat dengan melaporkan informasi mengenai keadaan, latar belakang, pilihan-pilihan baik pada masa lalu, masa kini dan harapan untuk masa depan. Namun, pada era persaingan industri media dan banjir informasi, media melakukan persaingan dengan cara tak sehat melalui sensasionalisasi dan pelabelan sehingga jurnalis sering terjebak dalam konflik permukaan.

Community Conflict and the Press (Tichenor, et.al, 1980: 119) Iwan Awaluddin Yusuf (2010) mengungkapkan, seberapa pun kecil suatu kontroversi, jika diliput dan diberitakan media massa akan berubah menjadi konflik yang lebih besar. Paling tidak keberadaannya akan memiliki legitimasi. Realitas media memberitakan konflik bukanlah persoalan sederhana. Efek pemberitaan melalui media massa memiliki dua sisi ambivalen: mempertajam atau sebaliknya, mereduksi konflik.

Pertarungan kepentingan seperti kepentingan bisnis, ideologis, politis yang seringkali mendorong jurnalis menomorduakan kontrol profesinya. Implikasinya, liputan dan pelaporannya menjadi bias, tidak berimbang, tidak adil, bahkan menimbulkan atau memperparah konflik.

Kelemahan jurnalis saat ini di antaranya tidak mampu menangkap realitas di masyarakat. Ini terungkap dari kebiasaan jurnalis yang lebih banyak mewawancarai narasumber yang mudah didapat dari elite atau pejabat, polisi dan kalangan birokrat

dan menulis tanpa *cover both side*. Kebijakan media dan pemilik media juga seringkali ikut memengaruhi kualitas produk jurnalistik. Menurut (Yanuar, 2012 : 42), lebih dari 50 ribu jurnalis tersebar di Indonesia masih kurang memahami konten, bahasa dan kedalaman informasi.

Isi pemberitaan cenderung memanipulasi fakta dan menjerumuskan pembaca atau penonton. Contohnya, kita dapat menyaksikan dalam sejumlah pemberitaan media nasional maupun media lokal yang mengangkat isu terorisme, SARA, bahkan seperti isu narkoba di balik penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Oktober 2013 yang mudah dimanipulasi untuk memunculkan sensasi berita.

Peliputan isu terorisme misalnya, jurnalis sering melakukan justifikasi. Banyak media yang “menghukum” orang yang belum diketahui kebenarannya dan kebanyakan melaporkan hanya dari sumber yang diragukan kredibilitasnya. Padahal, pemberitaan yang belum diuji kebenarannya menyesatkan opini publik.

Ketika TVOne melakukan reportase mengenai terorisme di Temanggung 8 Agustus 2009 yang disiarkan secara langsung, reporternya mengklaim bahwa teroris buruan Noordin M. Top telah tewas tertembak dalam baku tembak dengan Tim Gegana Mabes Polri. Ternyata laporan itu tidak terbukti kebenarannya. Sang reporter hanya mendapat informasi desas-desus dari jurnalis lain. Dengan dalil aktualitas, TVOne menyiarkan berita tersebut. Tetapi tidak ada sanksi atas pelaporan yang buruk sebagai dampak tingginya kompetisi antarmedia. (Yanuar, 2012 : 43).

Tidak hanya dalam kemasan isi berita, tapi juga dalam membuat judul berita, jurnalis cenderung bombastis, provokatif dan menimbulkan serta menggiring opini publik yang negatif. Secara umum, kondisi ini terjadi pada jurnalis di Indonesia.

Untuk menghindari bombastisme atau provokasi, jurnalis biasa membuat judul-judul atau teks yang menghindari penggunaan kata-kata yang memicu konflik (Syahputra, 2006:97). Ajektif negatif seperti “brutal”, “licik”, atau “barbar” perlu dihindari. Judul berita yang sensasional, provokatif dan menggiring opini publik yang negatif bahkan memicu konflik dari hasil karya jurnalistik dapat dilihat dari contoh berikut ini :

1. Kata “bodoh” tidak pantas disematkan bagi seorang ibu negara karena cenderung kasar dalam judul, *“Ibu Ani : Komentar Anda Sangat Bodoh!”*

(Suara Merdeka, 18 Oktober 2013)

2. "10 Senjata Tajam Sudah Disiapkan." (Suara Merdeka, 18 Oktober 2013). Penggunaan kalimat dalam judul tersebut provokatif terhadap pihak yang berkonflik.
3. Penggunaan kata "hamil di luar nikah" menunjukkan persepsi negatif dalam judul, "*Ganjar: Sosialisasi PLTU Batang Ibarat Anak Hamil di Luar Nikah.*" (Merdeka.com, 4 September 2013)
4. "*Kubu PB XIII Dituding Libatkan Warga dalam Konflik.*" (Tempo.co, 30 Agustus 2013). Judul ini mempertajam konflik yang berlangsung di Keraton Solo.
5. "*Konflik Keraton, Wisata Baru Solo.*" (Tempo.co, 28 Agustus 2013). Judul itu menimbulkan opini negatif publik terhadap Keraton Solo.
6. Kata "disandera" yang provokatif dalam judul, "*Raja Pakubuwono XIII Disandera?*" (Tempo.co, 27 Agustus 2013)
7. Penggunaan kata vulgar tidak sesuai dengan kaidah baku dalam kata "telanjang" dan "anunya" dalam judul, "*Sri Kaget Lihat Anak Setengah Telanjang Sakit Anunya.*" (Tribunjateng.com, 7 Desember 2013)

Jurnalisme yang meliput konflik tidak bertugas untuk meredam konflik melalui laporannya karena pilihan tersebut akan datang dari masyarakat. Yang harus dilakukan jurnalis adalah menjaga independensinya di lapangan. Ia tidak mewakili kelompok etnis atau agama tertentu dengan menciptakan stereotip tertentu di dalam tulisannya untuk membuka ruang seluas-luasnya dan menjelaskan substansi masalah sebanyak mungkin sehingga informasi yang disajikan semakin bermutu dan beragam sehingga khalayak memiliki banyak pilihan.

Jurnalisme Peka Konflik

Jurnalisme yang baik itu pada dasarnya memiliki dampak yang baik terhadap konflik yang terjadi. Dan jurnalis mempunyai kemampuan menciptakan saling pemahaman pada pihak yang berkonflik. Jika pihak yang berkonflik memahami apa yang terjadi, kemungkinan akan tercipta dialog di antara mereka. Selanjutnya, publik akan mengetahui pokok permasalahan sehingga konflik dapat diatasi atau ditemukan solusinya.

Sejak 2004, *The Peace and Conflict Journalism Network* (Pecojon) menganalisis liputan perang dan konflik di beberapa negara untuk memunculkan sebuah kesadaran baru akan peran jurnalis dalam konflik. Pecojon juga membuat pendefinisian ulang terhadap tanggung jawab semua pelaku media. Kesadaran baru ini juga memotivasi jurnalis dan lembaga media massa untuk memahami konflik lebih jauh dan membangun strategi baru dalam melaporkan fakta tanpa memperkeruh suasana.

Antonio Koop, Koordinator *Peace and Conflict Journalism Network* (Pecojon) Internasional mengemukakan, jurnalis atau media yang tidak sadar akan pengaruh yang mereka timbulkan, akan lebih rentan meningkatkan eskalasi konflik yang ada. Karenanya, di butuhkan media dan jurnalis yang memahami tugasnya dengan benar saat berada lapangan, khususnya saat terjadi konflik. Jurnalis memiliki peran sangat signifikan dalam konflik karena merekalah yang membentuk persepsi dari pihak yang bertikai atau persepsi tentang diri mereka sendiri dengan pihak lain.

Indonesia bisa dikatakan memiliki peta konflik yang cukup besar. Beragam konflik beserta potensi runtutannya menjadi ancaman tersendiri bagi stabilitas dan perdamaian. Jurnalisme peka konflik (*Conflict Sensitive Journalism*) sejatinya mampu memunculkan harmonisasi terhadap adanya konflik tersebut.

Jurnalisme itu memberi angin baru karena media massa memainkan peran penting dalam arena konflik. Konflik pun kemudian diartikan secara lebih luas. Tidak hanya dalam perang konflik horizontal seperti isu SARA, tapi juga mencakup setiap isu atau topik di berbagai bidang yang disajikan di media massa.

Dalam peliputan, jurnalis menggunakan alat berupa peta analisis konflik yaitu pemetaan terhadap masalah yang terjadi. Siapa yang terlibat, apa kepentingannya, serta hubungan semua pihak yang ada, serta *timelines* atau konfigurasi konflik beserta pemicunya. Dalam jurnalisme peka konflik, biasanya laporan tidak menyebutkan identitas pihak yang bertikai supaya tidak memicu konflik lebih luas baik di dalam maupun di luar daerah konflik. Tentu saja itu harus dilakukan dengan tetap memegang prinsip dan menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai jurnalistik, dan menjaga integritas.

Pada hakekatnya jurnalisme bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Jurnalisme peka konflik lebih menonjolkan aspek-aspek apa yang mendorong bagi

penyelesaian konflik. Jake Lynch dan Annabel McGoldrick (2005) mengemukakan jurnalisme damai terwujud ketika pelaku media peka terhadap konflik dan mengasah kemampuan untuk memilah dan menetapkan pilihan-pilihan dalam teks untuk mereduksi konflik. Berita apa yang akan dilaporkan dan bagaimana cara pelaporannya. Artinya, peluang publik untuk bersuara sehingga konflik dapat diredam selalu ada.

Namun, prinsip-prinsip jurnalistik dasar seperti ketidakberpihakan, akurasi dan keadilan seperti dalam kerangka tradisional analisis liputan media ternyata tidak selalu menjamin pelaporan yang peka dan bertanggung jawab. Pecojon menambahkan lapisan kedua kerangka kerja tradisional yakni:

- (1) Keanekaragaman dengan mendekati cerita dari berbagai sudut dan mencari penjelasan, tidak hanya mengikuti interpretasi utama dan alur cerita atau mencari berbagai perspektif tentang situasi.
- (2) *Multisourcing* untuk menjamin perspektif luas dan menghindari keberpihakan, jurnalis berkonsultasi dengan berbagai sumber, atau bahkan menyelidiki cerita secara mendalam.
- (3) Orang-orang yang menjadi fokus. Selain elite yang secara tradisional menjadi fokus perhatian, jurnalis harus membidik kelompok non-elite, individu, atau kelompok sumber penting. Pendekatan itu terutama dilakukan ketika meliput konflik, untuk menghindari instrumen propaganda, jurnalis harus memperhatikan suara warga.
- (4) Konteks. Setiap peristiwa yang dilaporkan harus tertanam dalam konteks situasi. Khalayak harus punya sebanyak mungkin informasi tentang konteks. Ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan penciptaan prasangka yang memicu eskalasi lebih lanjut.
- (5) Penyajian Informasi. Tugas jurnalis memberikan informasi kepada publik. Untuk membuat informasi dipahami adalah bagian proses transmisi informasi terhadap khalayak, jurnalis harus menyadari sensitivitas dari proses ini dan mempertahankan kebenaran ketika memproses informasi. Selain menyajikan "hanya fakta" juga harus mengantisipasi peran dan makna informasi tersebut.
- (6) Sensitivitas Budaya. Cakupan konflik sebagai setiap laporan membutuhkan pemahaman lebih dalam dalam budaya negara dan rakyat.

- (7) Proses atau Solusi Orientasi. Cakupan Konflik tidak harus dibatasi melaporkan peristiwa kekerasan dan insiden. Jurnalis harus menjaga telinga untuk setiap solusi dan perkembangan positif. Sebuah peristiwa harus dilihat dalam konteks kronologisnya.
- (8) Kebenaran Orientasi. Inti dari tugas jurnalis adalah untuk mencari kebenaran dan membuatnya dapat diakses untuk umum. Tidak ada kompromi untuk keuntungan pribadi atau organisasi.
- (9) Keandalan. Kredibilitas jurnalis tergantung pada keandalannya, tidak hanya bertumpu pada keakuratan laporan. Keandalan meliputi kelanjutan dari penerbitan, konsekuensi gaya dan presentasi, kualitas, dan perlindungan sumber.
- (10) Bahasa Sensitivitas. Laporan objektif dan benar, jurnalis menggunakan bahasa dan gaya penulisan sesuai kaidah baku.
- (11) Kreativitas. Jurnalis harus mampu menghasilkan kualitas laporan yang baik dan berimbang. Kreativitas dan insting untuk membawa ke cerita yang benar-benar penting.

Menurut Annabel McGoldrick dan Jake Lynch, Jurnalisme Perdamaian (JP) bersandar pada laporan suatu kejadian dengan bingkai yang lebih luas, berimbang dan akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan yang terjadi. Tugas utamanya adalah memetakan konflik, mengidentifikasi pihak yang terlibat, dan menganalisis tujuan. Pendekatan yang digunakan berupa pemberian jalan baru bagi pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik secara kreatif tanpa kekerasan melalui berbagai alternatif penyelesaian.

Menurut Abdul Razak dalam Jurnal Pers Indonesia (No.4/1997), menggambarkan situasi dan merumuskan realitas yang memengaruhi persepsi, reaksi, dan pilihan solusi. Pers bukan sekadar media penyampai informasi, tapi juga membangun debat publik yang sehat tentang kepentingan umum dengan merumuskan (1) masalah, (2) penyebab, (3) alternatif penyelesaian, (4) evaluasi alternatif, (5) pilihan alternatif terbaik, (6) sistem dan mekanisme pelaksanaan, (7) evaluasi dan *feedback*. Dengan strategi menelusuri akar konflik ini, jurnalis memaparkan masalah sebenarnya, dampak yang ditimbulkannya, lalu menawarkan alternatif penyelesaiannya.

Memang bukan hal yang mudah untuk mendapatkan suatu pemahaman yang jelas mengenai situasi objektifnya. Jurnalis harus menggali dan merujuk ke berbagai persepsi yang muncul dari seluruh pihak dan menjelaskan latar belakangnya. Kompleksitas itulah yang harus dipahami secara mendetail dengan hati-hati. Karena itu sebaiknya jurnalis tidak mengasumsikan realitas yang muncul untuk mewakili pihak tertentu.

Penutup

Karya jurnalistik merupakan hasil dari proses mencari, menggali, mengolah, menulis hingga menyajikan sebuah fakta dan data dari seorang jurnalis menjadi sebuah laporan berkualitas yang komprehensif di media massa. Sebagai sebuah laporan yang akan disajikan kepada khalayak atau publik maka laporan tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah baku. Pada kenyataannya, masih banyak karya jurnalistik dalam berbagai bentuk seperti *straight news*, *soft news* dari jurnalis yang jauh di bawah standar kaidah jurnalisme.

Banyak faktor yang memengaruhi kelemahan karya jurnalistik. Meskipun seorang jurnalis mempunyai landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional yang sudah ditetapkan dalam kode etik jurnalistik dan regulasi sesuai standar jurnalistik, ia seringkali masih lemah dalam menyajikan fakta, independensi, keberimbangan dan menjaga akurasi.

Rendahnya kualitas karya jurnalistik disebabkan antara lain pemahaman jurnalis terhadap jurnalisme, sikap dan perilaku mereka di lapangan. Ini terlihat dari pemilihan narasumber, penggalian data dan fakta, hingga mengolahnya menjadi sebuah laporan yang memenuhi standar kaidah jurnalistik. Kondisi ini juga juga dipengaruhi oleh kebijakan redaksi dan kebijakan pemilik media tempat jurnalis bekerja.

Tak memungkiri, media massa berperan penting dan berpotensi meredam maupun menciptakan dan memicu konflik hingga tanpa sadar berubah menjadi agen utama dalam menciptakan *survival of the fittest* (siapa yang kuat akan menang) di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana jurnalis membangun jurnalisme peka konflik dalam diri mereka sendiri untuk diterapkan dalam setiap proses jurnalistik? Jawabannya itu tentunya tidak mudah. Karena selain dibutuhkan komitmen tinggi untuk menjalankan credo jurnalisme tradisional, seorang

jurnalis juga dituntut untuk berorientasi peka konflik yang selama ini belum banyak diterapkan, dan justru cenderung diabaikan. Jurnalisme peka konflik bukanlah bentuk jurnalisme baru yang bertujuan menciptakan suatu kondisi khusus dalam masyarakat (seperti “perdamaian”) melainkan usaha atau pendekatan untuk menghasilkan reportase berkualitas dengan dasar nilai-nilai jurnalisme yang berlaku. Penerapan jurnalisme peka konflik ini mendorong pelurusan kembali praktik jurnalisme menyimpang, dan profesionalitas jurnalis dalam memegang teguh prinsip jurnalisme.

Jurnalisme peka konflik tentu juga sangat penting diterapkan bagi jurnalis yang berada di negara dengan masyarakat yang multikultur seperti di Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini, jurnalisme seyogyanya memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dwi Laksono, Dandy, dkk. (2012). *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*. Padang: AJI Padang dan Yayasan Tifa
- Hasrulah. (2009). *Dendam Konflik Poso: (Periode 1998-2001) Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta :Gramedia
- Ishwara, Luwi. (2001). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta : Kompas
- Kovack, Bill dan Rosenstiel. (2004). *Elemen-Elemen Jurnalisme, Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*. Jakarta: ISAI.
- Kovach, Bill , dan Rosentiel. (2012). *Blur ,Bagaimana Mengetahui Kebenaran Di Era Banjir Informasi*. Jakarta :Yayasan Pantau.
- Lynch, Jake, dan McGoldrick, Anabel. (2005). “*Peace Journalism: How To Do It*” ?, *Jurnalisme Damai: Bagaimana Melakukannya ?*. Jakarta : LSPP dan The British Council.
- Nugroho, Yanuar dan Sofie Shinta. (2012), *Seri Fesmedia Asia*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Syahputra, Iswandi.(2006). *Jurnalisme Damai “Meretas Ideologi Peliputan di Are Konflik”*. Yogyakarta: P_IDEA Kelompok Pilar Media
- Webel, Charles & Galtung, Johan. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York : Taylor & Francis e-Library, Routedge 270 Madison

Avenue.

Sumber lain :

- Koop, Antonio. (2010), "Work Enviroment of Philippine Journalist." *Makalah*. Disampaikan dalam Training Jurnalis Peace and Conflict Journalism Network (Pecojon) Internasional Yogyakarta pada Juli 2010.
- Lesmana, Tjipta. (2005). "Kebebasan Pers Dilihat Dari Perspektif Konflik, Antara Kebebasan dan Tertib Sosial." *Ilkom Universitas Atmajaya Yogyakarta* 2 (1) (Juni): hal 1-13.
- Lynch, Jake, dan McGoldrick, Anabel. (2001). "What is Peace Journalism?". *Artikel*. Disampaikan pada Conflict and Peace Forum.
- Nurrudin. (2006). "Pentingnya Menegakkan Jurnalisme Kemanusiaan" *Ilkom/ Fisip UPN Veteran Yogyakarta* 4 (3) (September-Desember): hal 195-206.
- Oktarianisa, Sefti. (2009). "Pandangan Jurnalis TV Mengenai Aplikasi Konsep Jurnalisme Damai Pada Berita Perang di Televisi Indonesia." *Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia* 7 (3) (September-Desember): hal 539-557.
- Sofiati A, Evie. (2011). "Nilai Berita Dan Etika Media Dalam Tayangan Liputan Penyergapan Teroris di Temanggung." *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Wardhani, Andy Corry. (2014, Juni 6). "Jurnalisme Perang dan Kontribusi Jurnalisme Alternatif untuk Perdamaian." *Artikel*. Universitas Lampung.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. (2010, diakses 25 September 2014). "Dalam Kecamuk Konflik, Bagaimana Seharusnya Media Berpihak?". <https://bincangmedia.wordpress.com/tag/etika-peliputan-konflik/>